

KINERJA PEMBANGUNAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH¹

Kinerja Pembangunan Koperasi

Pembangunan koperasi menunjukkan kemajuan yang pesat pada periode 2000 - 2003, jika diukur dengan jumlah koperasi, jumlah anggota, aktiva dan volume usaha. Pertumbuhan jumlah koperasi meningkat menjadi 123.162 unit pada tahun 2003, meningkat 20.085 unit atau 19,49% dari 103.077 unit pada tahun 2000. Jumlah koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah koperasi. Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2000 sebanyak 36.283 unit meningkat menjadi 44.647 unit.

Jumlah anggota koperasi pada tahun 2003 sebanyak 27,28 juta orang, meningkat 4,42 juta atau 19,35% dari tahun 2000 sebanyak 22,85 juta orang. Periode pertambahan jumlah anggota koperasi relatif besar terjadi pada periode 2002 - 2003 yang meningkat lebih dari 3,279 juta orang. Hal ini diduga akibat meningkatnya kemampuan koperasi memberikan layanan, terutama kegiatan simpan pinjam dengan efektifnya dana bergulir untuk koperas. Koperasi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 226.954 orang yang terdiri dari 25.493 orang manajer dan 201.461 orang karyawan pada tahun 2003, yang berarti koperasi mampu menciptakan lapangan kerja sebesar 51,79% dari tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha besar.

Volume usaha koperasi pada tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 37,02% menjadi Rp 31.682,95 milyar dari

volume usaha koperasi pada tahun 2000 sebesar Rp 23.122,15 milyar. Volume usaha koperasi ini setara dengan 7% dari volume usaha menengah di Indonesia. Modal sendiri koperasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan (38,12%) selama periode 2000 - 2003. Modal luar juga mengalami peningkatan yang pesat sebesar 20,71% selama periode yang sama. Peningkatan modal luar ini diduga sebagian berasal dari dana bergulir yang difasilitasi oleh pemerintah (MAP, subsidi BBM dan lain-lain). Stimulan dana bergulir ini terbukti mampu meningkatkan partisipasi anggota untuk bertransaksi dengan koperasi dan meningkatkan partisipasi anggota dalam permodalan koperasi

Hasil usaha koperasi mengalami kenaikan yang fantastis sebesar 168,59% selama periode 2000 - 2003, yang mengakibatkan profitabilitas koperasi yang diukur dengan rasio profitabilitas modal sendiri meningkat dari 10,18% menjadi 19,79% pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan fasilitasi dan dukungan pemerintah dapat meningkatkan produktivitas dan profitabilitasnya serta meningkatkan layanan koperasi kepada anggotanya.

Secara umum koperasi mengalami perkembangan usaha dan kelembagaan yang atraktif selama periode 2000- 2003. Namun demikian, koperasi masih memiliki berbagai kendala untuk pengembangannya sebagai badan usaha, yaitu (1) rendahnya partisipasi anggota yang ditunjukkan dengan rendahnya nilai

¹⁾ Dikutip dari Rencana Program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005-2009

perputaran koperasi per anggota yang kurang dari Rp 100.000,00 per bulan dan rendahnya simpanan anggota yang kurang dari Rp 345.225,00, (2) efisiensi usaha yang relatif rendah yang ditunjukkan dengan tingkat perputaran aktiva yang kurang dari 1,3 kali per tahun, (3) rendahnya tingkat profitabilitas koperasi, (4) citra masyarakat terhadap koperasi yang menganggap sebagai badan usaha kecil dan terbatas, serta bergantung pada program pemerintah, dan (5) kompetensi SDM koperasi yang relatif rendah, serta (6) kurang optimalnya koperasi mewujudkan skala usaha yang ekonomis akibat belum optimalnya kerjasama antar koperasi dan kerjasama koperasi dengan badan usaha lainnya. Hal-hal di atas perlu memperoleh perhatian dalam pembangunan usaha koperasi pada masa mendatang.

Kinerja UMKM Dalam Perekonomian Indonesia

Secara umum peran usaha mikro dan kecil dalam PDB mengalami kenaikan dibanding sebelum krisis, bersamaan dengan merosotnya usaha menengah dan besar. Enam tahun setelah krisis, keadaan usaha menengah belum pulih, sedang usaha besar baru mulai pulih pada tahun 2003. Gambaran perbandingan posisi keuangan tahun 1997 dan 2003 memberikan gambaran bahwa krisis ekonomi memiliki dampak yang besar terhadap usaha menengah dan besar. Perekonomian nasional baru pulih dari krisis pada akhir tahun 2003. Usaha menengah semakin mengecil perannya dalam perekonomian nasional, dan secara perlahan tumbuh kembali. Usaha mikro dan kecil relatif yang paling cepat pulih dari krisis ekonomi dan pernah

Tabel 1
Perkembangan Data Koperasi Tahun 2000 dan 2003

| Variabel | 2000 | 2003 | Pertumbuhan |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|
| Jumlah Koperasi (unit) | 103.077 | 123.162 | + 19,49% |
| Jumlah Koperasi Yang Telah RAT | 36.283 | 44.647 | + 23,05% |
| Jumlah Anggota (orang) | 22.857.893 | 27.280.916 | + 19,35% |
| Jumlah Manajer (orang) | 21.749 | 25.493 | + 17,21% |
| Jumlah Karyawan (orang) | 197.810 | 201.461 | + 1,85% |
| Modal Sendiri (Rp juta) | 6.818.953 | 9.417.983 | + 38,11% |
| Modal Luar (Rp juta) | 12.373.404 | 14.936.005 | + 20,71% |
| Volume usaha (Rp juta) | 23.122.152 | 31.682.951 | + 37,02% |
| Sisa Hasil Usaha (Rp juta) | 694.504 | 1.864.380 | + 168,45% |

Sumber Kementerian Koperasi dan UKM

Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004

memberikan kontribusi yang terbesar dalam perekonomian nasional, terutama pada puncak krisis ekonomi tahun 1998 dan 1999, Namun kemudian tergeser kembali oleh usaha besar.

Krisis ekonomi telah mengakibatkan jumlah unit usaha menyusut secara drastis (7,42%), dari 39,77 juta unit usaha pada tahun 1997 menjad 36,82 juta unit usaha pada tahun 1998, dan bahkan usaha menengah dan besar mengalami penurunan jumlah unit usaha

lebih dari 10%. Usaha menengah relatif yang paling lamban untuk pulih dari krisis ekonomi, padahal usaha menengah memiliki peran strategis untuk menjaga dinamika dan keseimbangan struktur perekonomian nasional dan penumbuhan kehidupan yang lebih demokratis. Tabel 3. memberikan gambaran upaya pemulihan jumlah unit usaha dari krisis ekonomi selama pemerintahan Kabinet Gotong Royong.

Tabel 2
Perbandingan Komposisi PDB Menurut Kelompok Usaha Pada Tahun 1997 dan 2003
Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Milyar Rupiah)

| No. | Skala Usaha | 1997 | 2003 | Pertumbuhan |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | Usaha Mikro dan Kecil | 171.048 (40,45) | 183.125 (41,11) | +7,06% |
| 2 | Usaha Menengah | 78.524 (17,41) | 75.975 (15,61) | - 3,25% |
| 3 | Usaha Besar | 1183.673 (42,17) | 185.352 (43,28) | + 0,91% |
| <i>Jumlah PDB</i> | | 433.245 (100) | 444.453 (100) | + 2,59% |

Sumber. BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Tabel 3
Perkembangan Jumlah Unit Usaha Tahun 1997, 2000 dan 2003

| No. | Skala Usaha | Tahun 1997 | Tahun 2000 | Tahun 2003 | Pertumbuhan |
|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Usaha Kecil | 39.704.661 | 38.669.335 | 42.326.519 | 9,46% |
| 2 | Usaha Menengah | 60.449 | 54.632 | 61.986 | 13,46% |
| 3 | Usaha Besar | 2.097 | 1.973 | 2.243 | 13,68% |
| <i>Jumlah</i> | | 39.767.207 | 38.725.940 | 42.390.749 | 9,46% |

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Tabel 2 dan 3 memberikan indikasi bahwa krisis ekonomi telah mengakibatkan pelaku ekonomi di Indonesia tertinggal selama 5 tahun dibandingkan pelaku ekonomi dari negara lainnya. Untuk itu, perlu komitmen, inovasi dan strategi pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan daya saingnya pada masa mendatang.

Usaha mikro, kecil dan menengah memberikan lapangan kerja bagi 99,45% tenaga kerja di Indonesia, dan masih akan menjadi tumpuan utama penyerapan tenaga kerja pada masa mendatang. Selama periode 2000 - 2003, usaha mikro dan kecil telah mampu memberikan lapangan kerja baru bagi 7,4 juta orang dan usaha menengah mampu memberikan lapangan kerja baru sebanyak 1,2 juta orang. Pada sisi lain, usaha besar hanya mampu memberikan

lapangan kerja baru sebanyak 55.760 orang selama periode 2000 - 2003. Hal ini merupakan bukti bahwa UMKM merupakan katup pengaman, dinamisator dan stabilisator perekonomian Indonesia.

Kontribusi UMKM pada ekspor non migas terus mengalami peningkatan secara perlahan, dan Rp 75.448 milyar pada tahun 2000 menjadi Rp 75.859 milyar pada tahun 2003, sedang usaha besar mengalami penurunan dari Rp 314.518 milyar menjadi Rp 305.397 milyar pada periode yang sama. Pada sisi lain, usaha mikro dan kecil relatif rendah penggunaan bahan baku impornya (5,8%) jika dibandingkan dengan usaha menengah (9,3%) dan usaha besar (14,7%). Hal ini membuktikan usaha mikro, kecil dan menengah memberikan kontribusi yang positif untuk neraca pembayaran Indonesia.

Tabel 4
Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha
Pada Tahun 2000 dan 2003 (orang)

| No. | Skala Usaha | 2000 | 2003 | Pertumbuhan |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | Usaha Mikro dan Kecil | 62.856.765 (88,79) | 70.282.178 (88,43) | 7.425.413 (11,81%) |
| 2 | Usaha Menengah | 7.550.674 (10,67) | 8.754.615 (11,02) | 1.203.941 (15,94%) |
| 3 | Usaha Besar | 382.438 0.54) | 438.198 (0,55) | 55.760 (14,58%) |
| <i>Jumlah Tenaga Kerja</i> | | 70.789.877 (100) | 79.474.991 (100) | 8.685.114 (12,27%) |

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Tabel 5
Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Menurut Skala Usaha
Pada Tahun 2000 dan 2003 (Milyar Rupiah)

| No. | Skala Usaha | 2000 | 2003 | Perkembangan |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | Usaha Mikro dan Kecil | 21.136.510 (5,42) | 20.464.869 (5,37) | - 671.641 |
| 2 | Usaha Menengah | 54.312.096 (13,93) | 55.394.449 (14,53) | + 1.082.353 |
| 3 | Usaha Besar | 314.518.682 (81,63) | 305.397.028 (80,10) | - 9.121.654 |
| <i>Jumlah Nilai Ekspor</i> | | 389.957.289 (100) | 381.256.346 (100) | - 8.700.943 |

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Hasil analisis input-output mengindikasikan omzet usaha mikro dan kecil 61,6% dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga dan hanya 19,5% dipengaruhi oleh ekspor, sedang usaha besar omzet usahanya lebih dipengaruhi oleh ekspor (44,3%). Tingkat ketergantungan usaha mikro dan kecil dalam menghasilkan barang dan jasa terhadap usaha besar sebariyak 14,9% dan ketergantungan pada usaha menengah 6,7%, dan sebaliknya ketergantungan usaha besar terhadap usaha kecil dari usaha menengah masing-masing sebanyak 11,3% dan 5,5%. Ketergantungan usaha menengah terhadap usaha kecil dan usaha besar masing-masing-masing 19,5% dan 15%. Fenomena pada tabel 6 menjelaskan dinamika ekonomi domestik lebih mempengaruhi usaha mikro, kecil dan menengah dibandingkan usaha besar.

Tabel input-output mengindikasikan setiap perubahan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan UMKM akan

memiliki dampak peningkatan output ekonomi nasional yang lebih besar daripada perubahan permintaan terhadap usaha besar, karena umumnya sektor UMKM memiliki indeks daya penyebaran dan indeks daya kepekaan yang relatif tinggi. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki indeks daya penyebaran yang tinggi, antara lain: industri sepeda; industri barang perhiasan; industri minyak; penggilingan padi, industri hasil pengolahan kedele; industri pengolahan daging dan ikan; industri tepung; industri barang dari kayu, bambu dan rotan; jasa restoran, industri pakaian jadi; unggas dan hasil-hasilnya; dan industri roti dan sejenisnya. Sektor UMKM yang memiliki daya kepekaan yang tinggi antara lain jasa perdagangan; jasa lembaga keuangan; padi; jasa perbengkelan; jasa angkutan darat; perkebunan; sewa bangunan dan jasa perusahaan; bangunan; kayu dan hasil hutan lainnya; unggas; tebu; karet; dan industri tekstil.

Tabel 6
Struktur Output Menurut Skala Usaha Yang Dipengaruhi oleh Permintaan Akhir Tahun 2000

| Komponen Permintaan akhir | Struktur (%) | | | |
|-------------------------------|--------------|--------|--------|--------|
| | U K | U M | U B | Jumlah |
| Konsumsi Rumah Tangga | 61,61 | 48,77 | 33,35 | 45,70 |
| Konsumsi Pemerintah | 2,06 | 1,82 | 8,31 | 5,08 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 16,41 | 18,97 | 12,95 | 15,12 |
| Perubahan Stok | 0,48 | 0,43 | 1,09 | 0,77 |
| Ekspor | 19,45 | 30,01 | 44,30 | 33,32 |
| Jumlah | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (2003)

Tabel 7
Rerata Investasi, Investasi Per Unit dan Pertumbuhan Investasi Menurut Skala Usaha Periode Tahun 2000 2003

| Skala Usaha | Investasi (Rp. Milyar) | Pangsa (%) | Investasi per unit (Rp Juta) | Pertumbuhan (%) |
|-----------------|------------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| Mikro dan Kecil | 58.884 | 18,58 | 1,5 | 4,98 |
| Menengah | 73.191 | 23,05 | 1.290,6 | 6,12 |
| Besar | 185.043 | 58,37 | 91.424,2 | 4,64 |
| Total | 317.118 | 100,00 | 7,9 | 5,56 |

Sumber : BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (2003)

Dalam periode tahun 2000 - 2003, usaha mikro dan kecil merupakan kelompok yang paling rendah penyerapan investasinya dengan rerata pangsa sebesar 18,58%, yang diikuti oleh usaha menengah 23,05% dan usaha besar 58,37%. Jumlah investasi usaha mikro dan kecil dalam kisaran Rp 1,467 juta per unit per tahun, sedang usaha menengah dan besar masing-masing sebesar Rp 129

milyar dan Rp 9142 milyar per unit per tahun. Rendahnya investasi usaha mikro dan kecil merupakan indikasi terbatasnya kelompok usaha ini dalam mengakses sumberdaya produktif terutama pembiayaan pengembangan usahanya. Keterbatasan akses pembiayaan ini mengakibatkan usaha mikro dan kecil berkonsentrasi pada sektor yang padat karya dengan produktivitas yang relatif rendah.

Iklim investasi belum mampu mendatangkan investasi pada sektor usaha mikro dan kecil, meskipun usaha mikro dan kecil merupakan kelompok usaha yang paling efisien penggunaan investasinya dan umumnya dengan lag waktu investasi yang relatif pendek. Fenomena ini mengindikasikan usaha mikro dan kecil akan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi jika investasi diarahkan pada skala usaha mikro dan kecil. Untuk itu, pada masa mendatang perlu upaya untuk meningkatkan arus investasi pada sektor-sektor yang memiliki ICOR rendah dan lag waktu investasi optimal yang pendek terutama pada sektor-sektor UMKM (Tabel 8). Meningkatnya investasi pada skala usaha mikro, kecil dan menengah diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM, karena adanya penggunaan teknologi yang lebih baik.

jumlah investasi rendah, jangkauan pasar terbatas, jaringan usaha terbatas, permodalan dan akses pembiayaan terbatas, kualitas SDM terbatas, dan manajemen yang umumnya belum profesional, serta belum adanya pemisahan yang tegas antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan.

Produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah relatif masih rendah dibandingkan usaha besar, baik diukur dengan produktivitas POB per unit usaha maupun produktivitas PDB per tenaga kerja. Produktivitas PDB usaha besar per unit usaha setara dengan 19.000 kali usaha kecil atau setara dengan 162 kali produktivitas per tenaga kerja usaha kecil. Namun demikian, produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah memiliki tren laju pertumbuhan yang positif. Hal ini merupakan indikasi bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil dan

Tabel 8
ICOR Menurut Time Lag dan Skala Usaha Periode 2000 - 2003

| ICOR | UK | UM | UKM | UB | Total |
|-------|------|------|------|------|-------|
| Lag 0 | 2,66 | 7,05 | 4,10 | 8,82 | 5,85 |
| Lag 1 | 1,92 | 5,17 | 2,99 | 7,10 | 4,47 |
| Lag 2 | 1,53 | 4,40 | 2,44 | 5,87 | 3,67 |
| Lag 3 | 1,01 | 2,70 | 1,58 | 3,95 | 2,41 |
| Lag 4 | 2,12 | 5,71 | 3,32 | 8,20 | 5,04 |

Sumber : BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (2003)

Kinerja UMKM secara makro selama periode 2000 - 2003 relatif atraktif, namun demikian UMKM secara mikro masih memiliki kinerja yang perlu ditingkatkan, antara lain: tingkat produktivitas usaha dan produktivitas tenaga kerja relatif rendah, nilai tambah rendah, pangsa pasar di dalam negeri dan ekspor masih rendah,

menengah memberikan hasil yang positif.

Sektor usaha yang paling tinggi produktivitasnya bagi usaha kecil adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (Rp 705,58 juta per unit usaha pada tahun 2003) diikuti sektor bangunan (Rp 276,39 juta) dan sektor pertambangan dan penggalian (Rp 41,79 juta) Usaha

Tabel 9
Produktivitas PDB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Per Unit Usaha
Menurut Skala Usaha Periode 2000 - 2003 (Rp 000)

| TAHUN | UK | UM | UKM | UB | Total |
|-------|-------|-----------|-------|------------|--------|
| 2000 | 4.220 | 1.212.240 | 5.925 | 85.451.226 | 10.278 |
| 2001 | 4.345 | 1.352.820 | 6.121 | 96.135.367 | 10.583 |
| 2002 | 4.314 | 1.223.735 | 6.078 | 86.385.456 | 10.473 |
| 2003 | 4.327 | 1.225.687 | 6.113 | 82.635.856 | 10.485 |

Sumber : BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (2003)

menengah yang paling produktif bergerak pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan (Rp 1539 milyar) diikuti sektor keuangan dan jasa perusahaan (Rp 8,71 milyar), pengangkutan (Rp 8,17 milyar) dan sektor industri pengolahan (Rp 7,38 milyar). Usaha besar yang paling produktif umumnya bergerak di sektor industri pengolahan (Rp 471,57 milyar) diikuti sektor listrik, gas dan air bersih (Rp 41681 milyar).

Pada tahun 2003, usaha mikro, kecil dan menengah yang paling tinggi produktivitas PDB per tenaga kerja dihasilkan oleh sektor keuangan dan jasa perusahaan masing-masing Rp 169,43 juta dan Rp 196,44 juta per tenaga kerja per tahunnya. Sektor terendah produktivitasnya untuk usaha mikro dan kecil berada di sektor pertanian (Rp 6,82 juta) dan industri pengolahan (Rp 9,61 juta), sedang untuk usaha menengah berada di sektor jasa (Rp 10,94) dan industri pengolahan (Rp 15,98 juta).

Tabel 10
Produktivitas PDB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Per Tenaga Kerja
Menurut Skala Usaha Periode 2000 2003 (Rp 000)

| TAHUN | UK | UM | UKM | UB | Total |
|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 2000 | 2.596 | 8.771 | 3.258 | 440.843 | 5.623 |
| 2001 | 2.592 | 9.203 | 3.277 | 454.245 | 5.637 |
| 2002 | 2.597 | 978 | 3.276 | 439.237 | 5.614 |
| 2003 | 2.606 | 8.678 | 3.278 | 422.987 | 5.592 |

Sumber : BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (2003)

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memiliki produktivitas yang tertinggi bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini diduga karena sektor ini umumnya dikelola dengan manajemen usaha yang modern dalam arti ada sistem pembukuan yang jelas, didukung ketrampilan SDM pengelola yang lebih baik, adanya persyaratan legal formal yang harus dipenuhi, serta didukung sistem pengendalian intern yang memadai. Berdasarkan kondisi di atas, maka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada masa mendatang perlu memberikan prioritas pada upaya pengembangan legalitas formalnya, peningkatan ketrampilan SDM koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta dukungan sistem pengendalian intern dan pembukuannya.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan perlu memperoleh prioritas untuk dikembangkan pada masa mendatang mengingat perannya yang strategis untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak di sektor lainnya.

Perlunya KUMKM Sebagai Prioritas Program Pembangunan

Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat

strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang.

Pembangunan KUMKM secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyesuaikan struktur perekonomian nasional mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6% per tahun, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasikan sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pembangunan KUMKM seharusnya diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, serta secara sistematis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis pengetahuan, teknologi dan sumberdaya lokal.

Pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang memadai. Pada kondisi ekonomi Indonesia saat ini relatif sulit menarik investasi dalam jumlah yang besar. Untuk itu, keterbatasan investasi perlu diarahkan pada upaya mengembangkan wirausaha mikro, kecil dan menengah, karena memiliki 10CR yang rendah dengan lag waktu yang singkat. Pembangunan UMKM diharapkan lebih mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dalam jangka waktu yang relatif pendek dan mampu memberikan lapangan kerja yang lebih luas dan lebih banyak, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Pengembangan UMKM diharapkan akan meningkatkan stabilitas ekonomi makro, karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor,

sehingga akan membantu menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi. Pembangunan UMKM akan menggerakkan sektor di, karena UMKM umumnya memiliki keterkaitan industri yang cukup tinggi. Sektor UMKM diharapkan menjadi tumpuan pengembangan sistem perbankan yang kuat dan sehat pada masa mendatang, mengingat non-performing loannya yang relatif sangat rendah. Pengembangan UMKM juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya.

Adanya lapangan kerja dan

meningkatnya pendapatan diharapkan akan membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman dan damai add dan demokratis; serta sejahtera. Sulit mewujudkan keamanan yang sejati, jika masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Sulit mewujudkan demokrasi yang sejati, jika terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat, serta sulit mewujudkan keadilan hukum jika ketimpangan penguasaan sumberdaya produktif masih sangat nyata. Pembangunan UMKM merupakan saiah satu jawaban untuk mewujudkan visi Indonesia yang aman, adil dan sejahtera.